



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : UMI KALSUM, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DANANG SURYO WIBOWO, S.H., L.L.M
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gedong Tataan, 12 Januari 2026,

Pihak Kedua,


KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
LAMPUNG,
(DANANG SURYO WIBOWO, S.H., L.L.M)

Pihak Pertama,


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PESAWARAN,
(UMI KALSUM, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN
TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	90%
2	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengendalian perkara	90%
		Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	90%
3	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	90%
4	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks reformasi birokrasi	90%
		Tingkat penerapan etika profesi jaksa	90%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 220.033.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 9.123.848.000
Jumlah		Rp 9.343.881.000

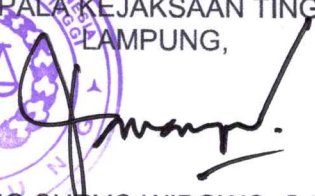
D. PRIORITAS NASIONAL

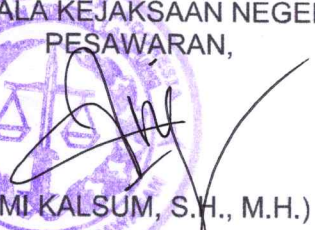
Layanan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Gedong Tataan, 12 Januari 2026,

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
LAMPUNG,

(DANANG SURYO WIBOWO, S.H., L.L.M.)

Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PESAWARAN,

(UMI KALSUM, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RENGGA PUSPA NEGARA,S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : UMI KALSUM, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gedong Tataan, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PESAWARAN,

(UMI KALSUM, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

(RENGGA PUSPA NEGARA,S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI	Nilai SAKIP Kejaksaan Negeri Pesawaran	90%
2	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kejaksaan RI	Nilai Kinerja Anggaran Kejaksaan Negeri Pesawaran	95%
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI	Tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap standar operasional prosedur	90%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya kualitas layanan internal dukungan manajemen dan kesehatan yustisial	Indeks kepuasan layanan dukungan internal manajemen Kejaksaan Negeri Pesawaran	90%
5	Meningkatnya kompetensi Aparatur Kejaksaan RI	Persentase aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai jabatan	95%
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Pesawaran	95%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Perkantoran	Rp. 9.123.848.000
Jumlah		Rp. 9.123.848.000

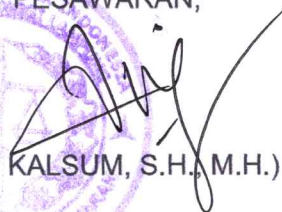
D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

- 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
- 3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Gedong Tataan, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PESAWARAN,

(UMI KALSUM, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

(RENGGA PUSPA NEGARA, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FUAD ALFANO ADI CHANDRA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : UMI KALSUM, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

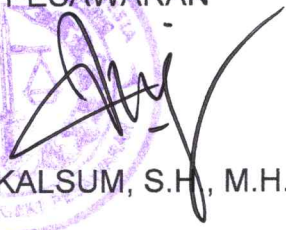
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pesawaran, 12 Januari 2026

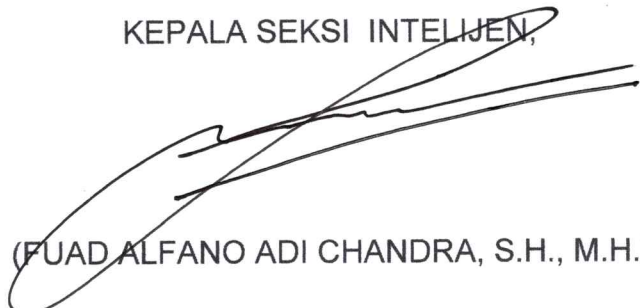
Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PESAWARAN


(UMI KALSUM, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,


(FUAD ALFANO ADI CHANDRA, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemahaman Hukum Masyarakat yang Memuaskan Pemangku Kepentingan	Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat atas Materi Sosialisasi Hukum	90%
		Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Layanan Lukumpenkum	90%
2	Meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum	Tingkat efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	91%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	Kejaksaan		
3	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Pesawaran	60%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kampanye Anti Korupsi	Rp 1.955.000
2	Penyelidikan, Pengamanan, Penggalangan	Rp 958.000
3	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Rp 2.625.000
4	Penerangan Hukum	Rp 1.849.000
5	Penyuluhan Hukum	Rp 29.458.000
Jumlah		Rp 36.845.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Pesawaran.

No	Sasaran Program	Target Kinerja	
		Periode Januari - Desember 2026	
		Capaian	Anggaran
1	a. Penyuluhan hukum	8	Rp 29.458.000
	b. Penerangan hukum	1	Rp 1.849.000

E. KINERJA TAMBAHAN

- 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
- 3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

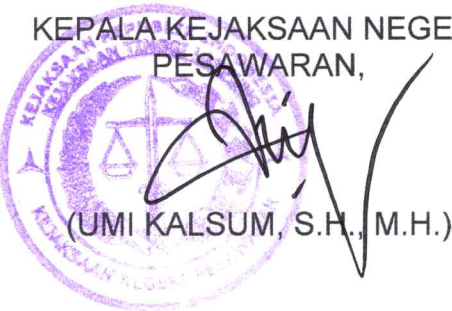
Pesawaran, 12 Januari 2026

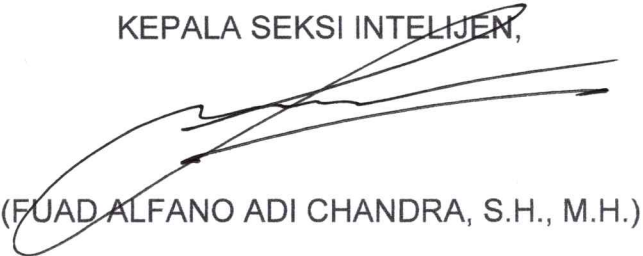
Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PESAWARAN,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,


(UMI KALSUM, S.H., M.H.)


(FUAD ALFANO ADI CHANDRA, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HENDRA DWI GUNANDA, SH., MH.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : UMI KALSUM, SH., MH.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

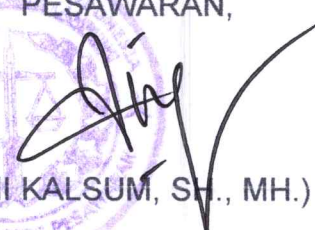
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gedong Tataan, 12 Januari 2026

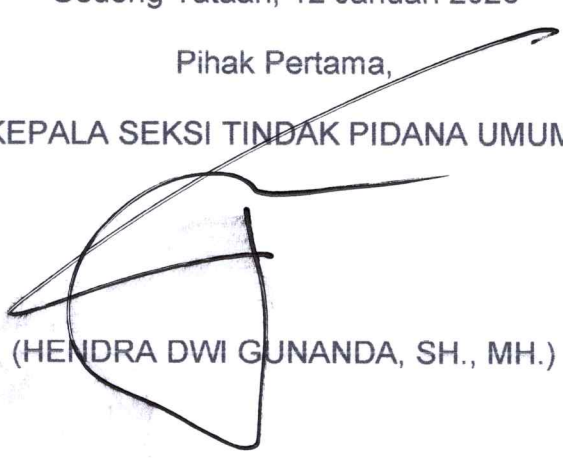
Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PESAWARAN,


(UMI KALSUM, SH., MH.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,


(HENDRA DWI GUNANDA, SH., MH.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026
Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

- B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026
- 1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
 - 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
 - 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
 - 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
 - 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
 - 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
 - 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
 - 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga pra penuntutan	100%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi	100%
2	Meningkatnya penegakan hukum yang yang adil, humanis, proporsional, dan efisien	Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai	100%
3	Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan	Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam Case Management System	100 %
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	100%
5	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	PRAPENUNTUTAN	Rp. 3.313.000
2	PENUNTUTAN	Rp. 45.260.000
3.	EKSEKUSI	Rp. 1.610.000
4.	RESTORATIVE JUSTICE (RJ)	Rp. 2.018.000
Jumlah		Rp. 52.201.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penguatan program Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Pesawaran untuk mendukung reformasi hukum

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Gedong Tataan, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PESAWARAN,
(UMI KALSUM, SH., MH.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,
(HENDRA DWI GUNANDA, SH., MH.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARLIANSYAH ADAM, S.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : UMI KALSUM, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

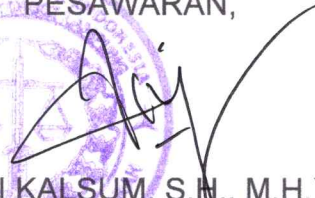
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gedong Tataan, 12 Januari 2026

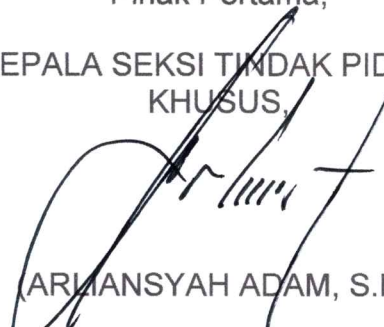
Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PESAWARAN,


(UMI KALSUM, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,


(ARLIANSYAH ADAM, S.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026
Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

- B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026
- 1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
 - 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
 - 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
 - 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
 - 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
 - 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
 - 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
 - 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penegakan hukum yang yang adil, humanis, proporsional, dan efisien	Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai	100%
2	Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	100%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanan dan TPPU	100%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU	100%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	100%
		Tingkat keberhasilan pengendalian operasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus	100%
3	Meningkatnya keberhasilan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana khusus	Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	100%
		Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanan, Perpajakan, Cukai, tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara)	100%
4	Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan	Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam <i>Case Management System</i>	100%
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	100%
6	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	PENYELIDIKAN	Rp. 5.855.000
2	PENYIDIKAN	Rp. 20.682.000
3	PRA-PENUNTUTAN	Rp. 1.657.000
4	PENUNTUTAN	Rp. 12.403.000

5	EKSEKUSI	Rp. 375.000
Jumlah		Rp. 40.972.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

- 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
- 3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Gedong Tataan, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

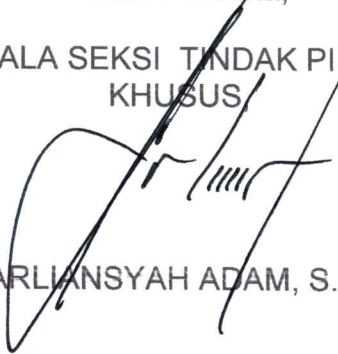
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PESAWARAN,



(UMI KALSUM, S.H. M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS,



(ARLIANSYAH ADAM, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vita Hestiningrum, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Umi Kalsum, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

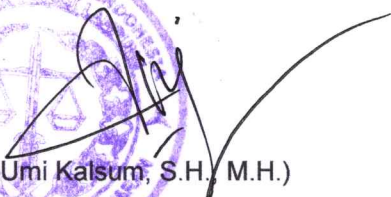
Gedong Tataan, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran,

Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara,


(Umi Kalsum, S.H., M.H.)


(Vita Hestiningrum, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara	Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer	100%
2	Meningkatnya efektivitas pelayanan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara	Indeks Persepsi atas pelayanan hukum	100%
3	Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata	100%
		Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	100%
4	Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara transparan, akuntabel, dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi	100%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi	100%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang hukum	Indeks kepuasan layanan Publik bidang hukum (Layanan hukum gratis, konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan hukum, dan penyuluhan hukum)	100%
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	100%
7	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan Tinggi Lampung	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Pengelolaan HALO JPN	Rp1.065.000
2	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	Rp1.290.000
3	Layanan Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa	Rp4.464.000
4	Layanan Perkara Perdata dan TUN	Rp6.561.000
5	Layanan Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum	Rp435.000
Jumlah		Rp13.815.000

D. PRIORITAS NASIONAL

- 1. Badan Gizi Nasional Kabupaten Pesawaran Melakukan Pendampingan Hukum SPPG di Labupaten Pesawaran.

E. KINERJA TAMBAHAN

- 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
- 3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Gedong Tataan, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran,

Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara,


(Umi Kalsum, S.H., M.H.)


(Vita Hestiningrum, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TATANG HERMAWAN, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : UMI KALSUM, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gedong Tataan, 12 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PESAWARAN

(UMI KALSUM, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BB,

(TATANG HERMAWAN, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI
KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026
Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

- B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026
- 1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
 - 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
 - 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
 - 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
 - 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
 - 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
 - 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
 - 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya pemulihan aset yang terintegrasi	Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset	90%
		Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana	90%
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana	90%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang transparan, akuntabel, dan modern	Tingkat efektivitas pengelolaan Rupbasan	
		Tingkat efektivitas penyelesaian penyelamatan aset negara	90%
		Tingkat efektivitas pengelolaan data aset negara berbasis teknologi	90%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemeliharaan	Rp 24.000.000
2	Pemusnahan	Rp 25.520.000
3	Penyelesaian	Rp 26.680.000
Jumlah		Rp 76.200.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

- 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
- 3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

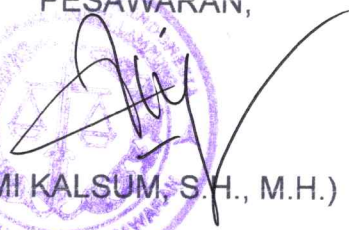
Gedong Tataan, 12 Januari 2026

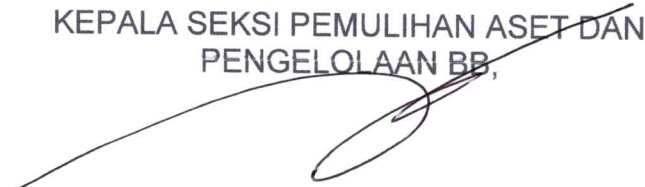
Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PESAWARAN,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BB,


(UMI KALSUM, S.H., M.H.)


(TATANG HERMAWAN, S.H., M.H.)